

BAB 5

SIMPULAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian pada UMKM roti dan kue yang terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Surabaya ini menunjukkan bahwa sebagian responden telah siap mengimplementasikan SAK ETAP dan sebagian besar lainnya masih belum siap mengimplementasikannya. UMKM roti dan kue yang dikelompokkan dalam kategori siap mengimplementasikan SAK ETAP adalah UMKM yang menyatakan diri bersedia untuk mengimplementasikan SAK ETAP di masa mendatang. Sebagian besar UMKM yang siap mengimplementasikan SAK ETAP adalah perusahaan yang memiliki sistem akuntansi yang cukup rapi. Perusahaan-perusahaan ini biasa membuat pencatatan akuntansi dan laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan laporan arus kas setiap bulan. Di samping itu, pernah mengajukan kredit usaha ke bank adalah salah satu alasan pendukung perusahaan ini siap untuk mengimplementasikan SAK ETAP. Hal ini dikarenakan laporan keuangan adalah salah satu syarat pemberian kredit oleh bank.

UMKM yang dikategorikan sebagai UMKM yang tidak siap mengimplementasikan SAK ETAP adalah UMKM

yang menyatakan diri tidak bersedia dalam mengimplementasikan SAK ETAP. Hal ini dikarenakan umumnya pencatatan dan pembuatan laporan keuangan tak pernah dilakukan perusahaan dengan alasan bahwa akuntansi itu rumit atau sulit, serta lainnya berpendapat bahwa mereka tidak membutuhkan pencatatan dan bahwa pencatatan akan menambah biaya bagi mereka. Perusahaan ini juga sebagian besar tidak mengajukan kredit usaha ke bank, sehingga pencatatan tidak dibutuhkan.

Rancangan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP dan karakteristik UMKM roti dan kue yang terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Surabaya yang diberikan pada UMKM yang siap mengimplementasikan SAK ETAP, dapat dijadikan dasar pembuatan laporan keuangan perusahaan guna kepentingan internal perusahaan dan kepentingan pengajuan kredit bank. Format laporan laba rugi yang dirancang memuat perhitungan harga pokok produksi sehingga perusahaan dapat menghitung laba bersih dengan tepat. Laporan perubahan ekuitas selama ini tidak pernah dibuat oleh perusahaan-perusahaan UMKM. Oleh karena itu, dengan adanya rancangan laporan keuangan ini diharapkan perusahaan memiliki pemisahan modal usaha dari kekayaan pribadi dan mengetahui perubahan modal yang dimiliki. Selanjutnya, neraca yang telah dirancang telah

mengelompokkan aset dan kewajiban serta ekuitas perusahaan dengan lebih terperinci sehingga perusahaan dapat mengetahui aset yang dimiliki baik untuk jangka pendek dan jangka panjang, dan begitu pula dengan kewajibannya. Laporan arus kas yang dirancangkan di atas dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui historis arus kas nya dengan tidak hanya memperhatikan aktivitas operasi perusahaan melainkan juga aktivitas investasi dan pendanaan perusahaan.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu obyek penelitian dilakukan pada saat responden mungkin sedang sibuk, sehingga dimungkinkan terdapat beberapa jawaban kuisisioner yang kurang tepat.

Keterbatasan informasi mengenai SAK ETAP menjadi hal yang patut diperhatikan bagi instansi terkait untuk melakukan adanya sosialisasi yang tepat pada para pengusaha UMKM agar di masa yang akan datang semakin banyak UMKM yang standar akuntansi nya menggunakan SAK ETAP dan dapat mempermudah mereka saat mengajukan pinjaman atau kredit Bank dengan menyerahkan laporan keuangan perusahaan.

Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil penelitian sejenis, maka peneliti selanjutnya dapat

memperluas obyek penelitian sehingga dapat
menggeneralisasi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Baas, T. dan M. Schrooten, 2006, Relationship Banking and SMEs: A Theoretical Analysis, *Small Business Economic*, Vol 27.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan: Entitas tanpa Akuntabilitas Publik*, Jakarta, DSAK-IAI.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tentang Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar tahun 2011-2012. (www.depkop.go.id, diunduh 23 Agustus 2013).
- Narsa, I. M., A. Widodo, dan S. Kurnianto, 2012, Mengungkap Kesiapan UMKM dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan, *Majalah Ekonomi*, Tahun XXII, No: 3, Desember: 204-214.
- Pemerintah RI, 2003, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Pemerintah RI.
- Pemerintah RI, 2008, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Jakarta: Pemerintah RI.

Pemerintah RI, 2003, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, No. 571/KMK.03/2003, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. [552/KMK.04/2000](#) tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Pemerintah RI, 2003, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, No. 40/KMK.06/2003, tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Jakarta: Pemerintah RI.

Pemerintah RI, 1999, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah Presiden Republik Indonesia, Jakarta: Pemerintah RI.

Prasetyo, Eko., 2008, Peran Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, *Akmenika UPY*, Volume 2.

Rudiantoro, R., dan S. V. Siregar, 2011, Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Proses Implementasi SAK ETAP, *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*.

Sariningtyas, P., dan T. D. Widajanti, 2011, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Usaha Kecil dan Menengah, *Jurnal*

Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol: 1, Hal 90-101.

Solovida, G. T., 2010, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyiapan dan Penggunaan Informasi Akuntansi pada Perusahaan Kecil dan Menengah di Jawa Tengah, *Prestasi*, Vol: 6, No. 1, Juni: 70-100.

Tambunan, T. T. H., 2002, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, Salemba Empat, Jakarta.

Warsono, S. dan E. Murti, 2010, *Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipraktikkan*, Yogyakarta : Asgard Chapter Winarno.